



RENSTRA 2023-2026

DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI
SULAWESI BARAT



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan Rahmat-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Renstra yang disusun melalui beberapa tahapan dan kajian dengan mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri yaitu "Penyusunan RPD Prov/Kab/Kota 2023-2026

dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Prov/Kab/Kota 2023-2026". Di bagian yang lain disebutkan bahwa "Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Prov/Kab/Kota 2023-2026 memperhatikan tujuan sasaran RPD Prov/Kab/Kota 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah"

Hal ini menjadi diperlukan perhatian yang ekstra karena biasanya Renstra Perangkat Daerah (PD) selalu mengacu dan mempedomani dokumen pada tingkat Provinsi yaitu RPJMD. Dalam keadaan RPJMD diganti dengan RPD proses penyusunannya dilakukan secara bersamaan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 merupakan dasar dan pedoman bagi Bidang maupun Unit Pelaksana Tugas Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Selain itu juga sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan perencanaan

pembangunan pendidikan di masing-masing daerah serta agar terjalin sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Strategis ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat serta seluruh stake holder pendidikan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan secara sinergis dan berkesinambungan. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Februari 2022



Kepala Dinas,
Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, ST., M.EMD
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19710213 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang.....	1
2. Landasan Hukum.....	3
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM	8
1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi Perangkat Daerah	9
2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	20
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	28
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsinya dan Pelayanan Perangkat daerah	30
2. Telaah visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih	36
3. Telaah renstra Kemendikbud Ristek Dikti	37
4. Telaah rencana tata ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
5. Penentuan isi Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
1. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	65
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62
1. Strategi dan Arah Kebijakan	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	76
1. Rencana Program	76
2. Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran	79

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
1. Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan	80
BAB VIII PENUTUP	86
1. Penutup	86
Lampiran- Lampiran.....	
1. Lampiran TC 23 - 32	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	4
Gambar 2.2	Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dikbud.....	15
Gambar 2.3	Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai	16
Gambar 2.4	Distribusi Golongan Pegawai	16
Gambar 2.2	Trend Capaian Kinerja Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia 2016-2021	20
Gambar 2.3	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Menengah	20
Gambar 2.3	Tahap Pembangunan Taman Budaya Sulawesi Barat Buttu Ciping tahun 2020-2022.....	21
Gambar 3.1	Trend Capaian Kinerja Pendidikan APK/APM Sulawesi Barat 2013-2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan PNS OPD Dikbud Menurut Jenjang Pendidikan	15
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	16
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel 2.4 Keadaan Pegawai Menurut Golongan	16
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022	17
Tabel 2.6 Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Tahun 2012 – 2019.....	17
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat (Tabel T-C.23).....	18
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat (Tabel T-C.24).....	19
Tabel T-B. 35 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	38
Tabel 4.1 Tujuan dan Formulasi Pencapaian Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.....	43
Tabel T-C. 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	42
Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2023 – 2023.....	46
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat	50
Tabel T-C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pencermatan kembali atas janji kemerdekaan, amanat konstitusi, Nawacita serta kondisi daerah terkini maka perlu di susun sistem perencanaan pembangunan untuk mewujudkan janji kemerdekaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra OPD.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi (RPD) Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat fleksibel. Renstra Tahun 2023-2026 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 82);
- 1.3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan dan pengembangan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Barat; dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 terbagi dalam 8 (delapan) bab, masing-masing merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Secara rinci tentang sistematika penulisan Renstra ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III. **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, telaahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi, dan implikasi RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. **Tujuan dan Sasaran;**

Pada bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

Bab V. Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;

Pada bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI. Rencana Program, dan Kegiatan, serta Pendanaan;

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2023-2026.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Pada bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup:

Berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan dalam kaidah pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan wajib yaitu **1) yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Pendidikan** dan **2) yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Kebudayaan**, yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat “**menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan**”.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pergub 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Bidang Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus, Kebudayaan dan Ketenagaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah menengah pertama dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerjasama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lain;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan masyarakat dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- j. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

2.1.2 Fungsi dan Susunan Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas urusan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat di bidang pendidikan dan kebudayaan terdiri atas:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat;

- c) Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA);
- d) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- e) Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar;
- f) Bidang Kebudayaan;
- g) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- h) UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan;
- i) UPTD Taman Budaya dan Museum;
- j) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I;
- k) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah II;
- l) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III; dan
- m) Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kepala Dinas

- a) Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar, Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- b) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar, Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas.
- d) Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

2) Sekretaris Dinas:

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas,

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Dinas dibantu oleh: a) Sub Bagian Program dan Pelaporan; b) Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Program dan Pelaporan
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Bidang Sekolah Menengah Atas

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah atas.

4) Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan

5) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar

Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar. Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas

Bidang Pendidikan Khusus Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Kurikulum dan Penilaian ;
- b. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Kelembagaan dan Sarana Prasarana ; dan
- c. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

6) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.

Bidang Kebudayaan, terdiri atas

- a. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Sejarah dan Tradisi; dan
- c. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan

7) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
- b. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- c. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan khusus.

8) UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pemanfaatan dan evaluasi pengembangan teknologi informasi komunikasi pendidikan dan kebudayaan (BPTIKPK)

UPTD Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (BPTIKPK), terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. subbagian tata usaha;
- c. seksi pemanfaatan;
- d. seksi evaluasi; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

9) UPTD Taman Budaya dan Museum

UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengkajian dan penatan, serta penyajian dan layanan edukasi taman budaya dan museum. UPTD Taman Budaya dan Museum, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. subbagian tata usaha;
- c. seksi pengkajian dan penataan;
- d. seksi penyajian dan layanan edukasi; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

10) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I

Merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Wilayah I, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. subbagian tata usaha;
- c. seksi Pembinaan SMA;
- d. seksi Seksi Pembinaan SMK; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

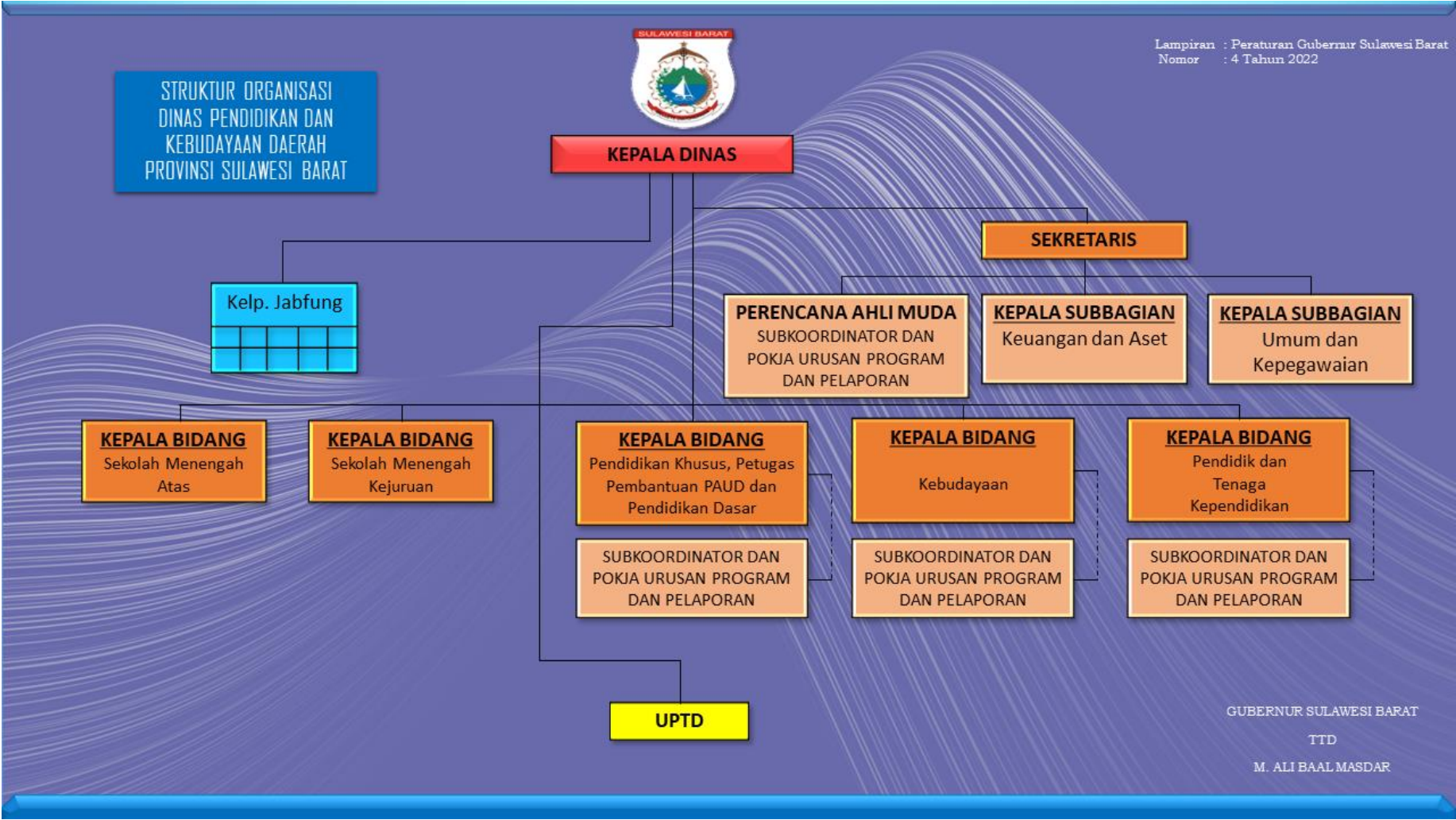
11) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah II

Merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah II mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara.

12) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III

Merupakan bagian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Mamasa.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana data yang ada (Oktober 2019) berjumlah 167 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari orang pegawai laki-laki dan orang pegawai perempuan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang Pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat Pendidikan SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada diagram berikut:

Tabel 2.1

Keadaan PNS OPD Dikbud Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Doktor (S-3)	1	0.59%
2	Magister (S-2)	37	21.76%
3	Sarjana (S-1)	91	53.53%
4	Diploma III & IV (D-III & D-IV)	5	2.94%
5	Diploma II (D-II)	0	0.00%
6	Diploma I (D-I)	1	0.59%
7	SMA Sederajat	35	20.59%
8	SMP Sederajat	0	0.00%
9	SD Sederajat	0	0.00%
Jumlah		170	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021

Bermodalkan SDM dengan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi yang beragam setiap personil memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini dapat dilihat berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Struktural Eselon I	-	-
2	Struktural Eselon II	1	0.02
3	Struktural Eselon III	9	0.15
4	Struktural Eselon IV	24	0.39
5	JFU dan Staf pada OPD	133	2.14
6	JFT Pengawas Sekolah	60	0.97
7	JFT Guru dan Kepsek	1,898	30.59
8	JFU dan Staf pada Satuan Pendidikan	288	4.64
9	PTT pada OPD DIKBUD	165	2.66
10	GTT/PTT pada SMA/SMK/SLB Negeri	3,626	58.45
Jumlah		6,204	100.00

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	89	53.29
2	Perempuan	78	46.71
Jumlah		167	100.00

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV/e	-	-
2	Golongan IV/d	1	0.04
3	Golongan IV/c	3	0.12
4	Golongan IV/b	426	17.65
5	Golongan IV/a	406	16.83
6	Golongan III/d	458	18.98

7	Golongan III/c	353	14.63
8	Golongan III/b	200	8.29
9	Golongan III/a	375	15.54
10	Golongan II/d	18	0.75
11	Golongan II/c	58	2.40
12	Golongan II/b	56	2.32
13	Golongan II/a	49	2.03
14	Golongan I/d	3	0.12
15	Golongan I/c	4	0.17
16	Golongan I/b	2	0.08
17	Golongan I/a	1	0.04
Jumlah		2,413	100.00

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021

Kondisi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sangat berpengaruh terhadap kinerja/layanan yang diberikan oleh suatu organisasi, demikian juga halnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Komputer	35	Unit
2	Monitor	9	Unit
3	Printer	63	Unit
4	Notebook/Laptop	33	Unit

5	LCD/Proyektor	7	Unit
6	Mesin Tulis/ Mesin Ketik	0	Unit
7	AC Split	4	Unit
8	Televisi	2	Unit
9	Sound System	2	Unit
10	Filling Kabinet	0	Unit
11	Lemari Arsip	59	Unit
12	Kendaraan Roda 4	8	Unit
13	Kendaraan Roda 2	16	Unit
14	Ruang Sidang/ Rapat (Daya Tampung)	10	Orang

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, Okt 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, berikut pagu anggaran dan Realisasi APBD Belanja Langsung Tahun 2012 – 2019, yaitu:

Tabel 2.6
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Tahun 2012 – 2019

No	Tahun	Pagu Anggaran BL (DAU/DID/DAK Fisik/DAK Non Fisik)	Pertumbuhan	Realisasi	Persentase
1	2012	37,964,650,000.00	-		-
2	2013	31,604,760,000.00	-16.75		-
3	2014	41,029,100,000.00	29.82		-
4	2015	64,171,515,750.00	56.40		-
5	2016	120,629,961,445.00	87.98	117,435,837,461.00	97.35
6	2017	193,369,598,604.00	60.30	175,298,490,865.00	90.65
7	2018	123,566,639,287.00	-36.10	118,576,462,433.90	95.96
8	2019 *)	206,554,655,207.24	67.16	96,409,692,751.00	46.68
Jumlah		818,890,880,293.24		507,720,483,510.90	

***) 2019 = Data Realisasi per 31 Oktober 2019**

Sumber: Sub Bagian Program dan Pelaporan, Okt 2019

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat selama tahun anggaran 2012 hingga Tahun 2019, menunjukkan angka yang fluktuatif, pada Tahun Anggaran 2013 terjadi penurunan sebesar Rp. atau %, kemudian pada Tahun Anggaran 2014 terjadi kenaikan sebesar Rp. atau %, pada Tahun Anggaran 2015 terjadi kenaikan

sebesar Rp. atau %, pada Tahun Anggaran 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp. atau % dan pada Tahun Anggaran 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp. atau %, pada Tahun Anggaran 2018 terjadi penurunan sebesar Rp. atau %, sedangkan untuk realisasi akhir tahun 2016 sampai dengan tahun Oktober 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.6 diatas.

Pagu Alokasi Anggaran Fungsi dan Urusan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan minimal 20% hingga tahun 2019 belum dapat terpenuhi dari alokasi APBD.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi kontribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

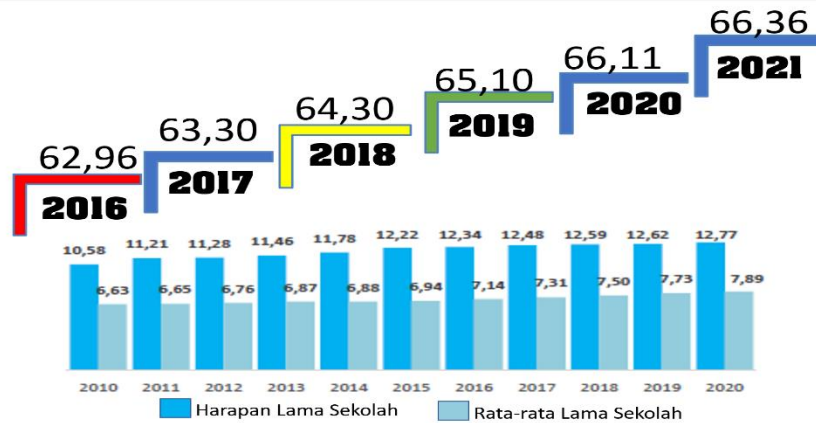
Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertekad membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter.

Hingga tahun terakhir pembangunan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat telah mengembangkan kebijakan strategis, 1). Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini; 2). Meningkatkan akses dan mutu pendidikan wajib belajar sembilan tahun; 3). Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah atas dan Khusus; 4). Meningkatkan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB; 5). Meningkatkan ketahanan budaya melalui pemeliharaan dan pengembangan kekayaan budaya dan Bahasa Daerah.

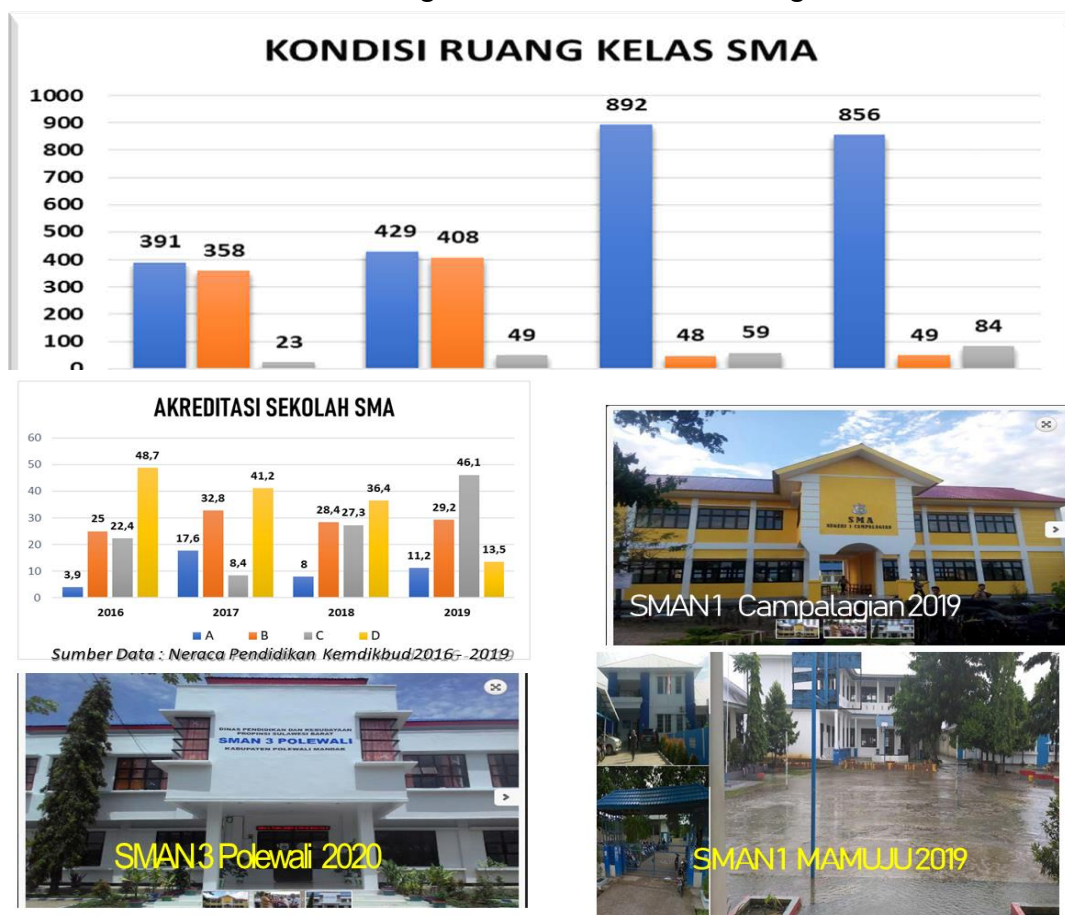
Atas kebijakan strategis tersebut, pembangunan pendidikan telah menunjukkan peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat melalui Indikator Pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah sebagai unsur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari urusan Pendidikan.

Gambar 2.2
Trend Capaian Kinerja Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia 2016-2021

CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2016 - 2021



Gambar 2.3
Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Menengah



Demikian Halnya dengan pembangunan Kebudayaan dengan kebijakan Meningkatkan ketahanan budaya melalui pemeliharaan dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya, dimuali pada tahun 2020 telah dibangun pusat kebudayaan yaitu Pembangunan Taman Budaya Buttu Ciping di Desa Beru-beru, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar dapat selesai pada tahun 2021 dan dilanjutkan biaya operasional pada tahun 2022.

Gambar 2.3
Tahap Pembangunan Taman Budaya Sulawesi Barat Buttu Ciping tahun 2020-2022



Meskipun dalam pelaksanaan kebijakan strategis tersebut masih banyak permasalahan yang harus dibenahi mulai dari pendataan, perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan. Secara umum capaian strategi pendidikan dan kebudayaan yang telah dilaksanakan dikelompokkan dalam 3 (tiga) misi utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan yaitu (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan, (2) Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, dan (3) Peningkatan Kualitas, Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berikut ini disajikan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat (Tabel T-C.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.00	17	18	19	20
1	Harapan Lama Sekolah				12.32	12.49	12.49	13.21		12.59	12.62	12.77	12.86		102.19	101.0408	102.24	97.35	-
2	Rata-rata Lama Sekolah				7.32	7.42	7.42	7.94		7.5	7.37	7.89	7.96		102.46	99.32615	106.33	100.25	-
3	APS SMA/SMK/MA/Paket C				74.32	74.62	74.62	100.00		89.48	69.31	69.84	71.22		120.40	92.88395	93.59	71.22	-
4	APK SMA/SMLB/MA/SMK /Paket C				67.30	85.87	85.87	91.94		89.48	93.76	98.03	88.73		132.96	109.1883	114.16	96.51	-
5	APM SMA/SMLB/MA/SMK /Paket C				60.82	63.18	63.18	88.91		60.6	64.78	65.26	56.59		99.64	102.5324	103.29	63.65	-
6	Guru Memenuhi Standar Berkualifikasi S1/D4				94.72	96.81	99.31	101.81	104.31	94.72	91.47	97.52			100.00	94.48	98.20	0.00	-
7	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan				-	-	-	90.00	95.00	-	-		85		-	0.00%	0.00%	94.44	-
8	Berkembangnya Nilai-nilai Budaya				33.00	15.00	20.00	22.00	25.00	33					100.00	0.00%	0.00%	0.00%	-
9	Terpeliharanya Situs-situs keurbakalaan				65.00	15.00	20.00	22.00	25.00	60					92.31	0.00%	0.00%	0.00%	-
10	Terpeliharanya Kelestarian Budaya Lokal				10.00	15.00	20.00	22.00	25.00						-	0.00%	0.00%	0.00%	-

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat (Tabel T-C.24)

No	Uraian ***	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Administrasi Pelayanan Perkantoran	3,954,005,000	794,917,000	1,785,305,593	897,018,220	-	3,922,060,852	766,014,921	1,766,175,691	883,710,849	-	99.19	96.36	98.93	98.52	-	297,249,833	293,518,493
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	472,953,000	173,000,000	415,630,000	453,304,400	-	469,260,500	170,926,000	413,950,000	448,350,000	-	99.22	98.80	99.60	98.91	-	60,595,496	60,099,460
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	344,452,044	-	-	61,615,840	-	344,384,810	-	-	61,607,500	-	99.98	-	-	99.99	-	16,242,715	16,239,692
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	205,750,000	92,300,000	65,350,000	-	-	201,925,000	92,000,000	64,750,000	-	-	98.14	99.67	99.08	-	-	18,170,000	14,347,000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,869,538,000	1,920,385,000	1,809,356,200	1,731,551,800	-	1,867,108,000	1,895,332,000	1,767,029,200	1,726,109,800	-	99.87	98.70	97.66	99.69	-	293,233,240	290,223,160
6	Program Pendidikan Menengah	106,444,451,500	-	100,040,732,443	201,088,416,932	-	89,138,503,229	-	97,238,431,424	195,778,782,170	-	83.74	-	97.20	97.36	-	16,302,944,035	15,286,228,673
7	Program Pendidikan Luar Biasa	4,235,310,000	-	-	-	-	4,081,819,866	-	-	-	-	96.38	-	-	-	-	169,412,400	163,272,795
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	993,084,000	1,436,850,000	1,552,176,700	442,618,200	-	977,962,604	1,311,541,390	1,452,155,085	437,188,773	-	98.48	91.28	93.56	98.77	-	176,989,156	167,153,914
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5,380,216,500	17,596,003,700	13,135,928,322	8,584,603,672	-	5,248,781,490	17,124,628,770	12,873,604,360	7,592,508,496	-	97.56	97.32	98.00	88.44	-	1,787,870,088	1,713,580,925
10	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	1,110,500,000	752,000,000	810,825,400	249,603,000	-	1,096,464,000	737,779,300	810,825,400	247,755,200	-	98.74	98.11	100.00	99.26	-	116,917,136	115,712,956
11	Program Pengembangan Nilai Budaya	5,682,753,560	480,000,000	673,125,000	704,437,200	-	5,295,472,160	477,943,153	670,780,100	695,907,622	-	93.18	99.57	99.65	98.79	-	301,612,630	285,604,121
12	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1,015,000,000	1,624,212,000	2,605,213,000	172,582,000	-	1,007,012,200	1,573,359,301	2,401,340,110	161,902,200	-	99.21	96.87	92.17	93.81	-	216,680,280	205,744,552
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	2,220,974,000	267,052,000	2,870,617,450	-	-	1,865,743,060	253,100,292	2,822,269,375	-	-	84.01	94.78	98.32	-	214,345,738	197,644,509
14	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	60,273,085,000	65,000,000,000	85,771,320,000	#####	-	60,261,005,000	64,708,320,000	85,771,320,000	94,405,780,000	-	99.98	99.55	100.00	97.17	-	12,328,071,084	12,205,857,000
15	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas	-	12,591,411,030	-	-	-	-	11,766,570,398	-	-	-	-	93.45	-	-	-	503,656,441	470,662,816
16	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	-	15,948,859,045	-	-	-	-	13,807,284,843	-	-	-	-	86.57	-	-	-	637,954,362	552,291,394
17	Program Pembinaan Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar	-	#####	6,868,962,600	3,365,684,000	-	-	2,449,813,298.00	6,822,621,269	3,362,880,869	-	-	83.45	99.33	99.92	-	526,814,964	505,412,617
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	242,846,286,595	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	98.84	9,713,851,464	9,601,123,731
19	Prgram Pengelolaan Pendidikan	-	-	-	-	278,343,962,439	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	86.71	11,133,758,498	9,654,086,862
20	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	142,760,380	-	-	-	-	142,233,058	-	-	-	-	99.63	5,710,415	5,689,322
21	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	-	-	-	-	1,004,700,000	-	-	-	-	987,265,400	-	-	-	-	98.26	40,188,000	39,490,616
22	Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	-	-	1,996,499,940	-	-	-	-	1,991,477,900	-	-	-	-	99.75	79,859,998	79,659,116
23	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	-	-	171,097,725	-	-	-	-	164,741,125	-	-	-	-	96.28	6,843,909	6,589,645
24	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	-	3,277,384,240	-	-	-	-	3,257,058,411	-	-	-	-	99.38	131,095,370	130,282,336
25	Program Pengelolaan Permuseuman	-	-	-	-	147,764,740	-	-	-	-	147,348,740	-	-	-	-	99.72	5,910,590	5,893,950
JUMLAH		191,981,098,604	123,566,639,287	215,800,977,258	317,779,424,813	527,930,456,059	173,911,759,711	118,747,256,434	212,306,082,931	308,624,752,854	#####						55,085,977,841	52,066,409,655

Rencana Strategi 2023-2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pengembangan serta pembinaan bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun kedepan adalah:

1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pelayanan pada publik;
- b. Sinergitas tanggung jawab dengan masyarakat;
- c. Kompetensi lulusan;
- d. Kondisi Geografis;
- e. Persaingan global.

2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah;
- b. Masyarakat Orang Tua dan Dunia Usaha/Industri;
- c. Standar Pelayanan Minimal;
- d. Penduduk usia sekolah;
- e. Kemajuan Teknologi Komunikasi;

3. Kekuatan

- a. Sumberdaya manusia dan fasilitas penunjang Tupoksi Disdik;
- b. Ketersediaan suber dana pembangunan pendidikan dari APBD dan APBN;
- c. Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pembangunan bidang pendidikan;

- d. Sistem Informasi Manajmen;
- e. Hasil pembangunan bidang pendidikan.

4. Kelemahan

- a. Optimalisasi SDM dan Tupoksi OPD;
- b. Ketepatan dan kesesuaian perencanaan dan penganggaran;
- c. Ketepatan dan kesesuaian jabatan;
- d. Keterlaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah
- e. Fasilitas Sistem Informasi Manajmenen di daerah;
- f. Akurasi dan kebermaknaan sarana dan prasarana;

Kondisi yang diharapkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan kualitas dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja guna peningkatan mutu dan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur secara optimal;
3. Mengoptimalkan koordinasi Organisasi baik internal maupun eksternal;
4. Optimalisasi sistem informasi manajemen dalam mendukung pembangunan pendidikan;
5. Mengoptimalkan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPD Provinsi Sulawesi Barat, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan untuk selama lima tahun ke depan (2023-2026).

3.1. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Perumusan perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak terlepas dari keterkaitan antar dokumen perencanaan, RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 - 2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) pada rentang waktu 4 (empat) tahun, dimana Renstra–PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 4 (empat) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023 - 2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023 - 2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023 - 2026 memperhatikan tujuan serta sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023 - 2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing–masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu–isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah

Dengan memperhatikan keterkaitan dokumen perencanaan tersebut di atas, serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, dan isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Tujuan : ***Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah***

Sasaran :

- ✓ Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah.
- ✓ Membaiknya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin.
- ✓ Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat.
- ✓ Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.

2. Tujuan : ***Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya***

Sasaran :

- ✓ Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata.
- ✓ Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3. Tujuan : ***Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.***

Sasaran :

- ✓ *Meningkatnya penanggulangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.*
- ✓ Meningkatnya sistem penanggulangan bencana daerah.

4. Tujuan : ***Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa***

Sasaran :

- ✓ Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- ✓ Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- ✓ Meningkatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 berdasarkan tugas dan fungsinya berkewajiban terhadap Tujuan dan Saran ke-2 yaitu: ***Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berbudaya dengan Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pendidikan yang Merata.”*** dengan indikator sasaran ***“Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)”***

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Pendidikan menerapkan strategi yaitu:

- a. Perluasan dan pemerataan akses dan keterjangkauan pendidikan dengan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan

3.2. **Telaahan Renstra Kemdikbudristekdikti dan Renstra Prov/Kab se Sulawesi Barat**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan isi pendidikan dan kebudayaan, Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbudristekdikti dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045.

Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah: Kemendikbud 2020-2024 adalah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan **Pelajar Pancasila**.

Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Untuk mencapai visi tersebut, misi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tahun 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2020-2024 berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan kebudayaan adapun **Tujuan Strategis** sebagai berikut:

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020-2024:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan Dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari ke lima tujuan Strategis, tersebut maka di tentukan sasaran-sasaran strategis tahun 2020-2024 berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan kebudayaan adapun sasaran tujuan Strategis sebagai berikut:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dansastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.akuntabel

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat pulau sulawesi yang terletak pada posisi geografis 0°46'13,03" - 3°46'13,4" Lintang Selatan dan 116°47'22,6" - 119°52'17,07" Bujur Timur (RTRW Provinsi Sulawesi Barat). Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas 16.787,18 km sedangkan luas wilayah laut sebesar 20.851,00 dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40, dimana terdiri atas 69 Kecamatan, 575 Desa dan 71 Kelurahan.

Sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan yang terkandung di bumi Provinsi Sulawesi Barat merupakan sumberdaya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Ruang sebagai sumberdaya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, penataan ruang Provinsi Sulawesi Barat menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

Untuk pendidikan dalam hal pembangunan gedung sekolah Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, tetapi justru melalui pendidikan diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penataan Lingkungan Sekolah, Pembangunan Akses Sekolah selalu memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tidak memanfaatkan ruang hijau yang ada.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan memprioritaskan pembangunan sarana jalan darat untuk solusi agar dapat menjangkau daerah-daerah yang belum bisa dijangkau melalui sungai, dengan demikian menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan di Sulawesi Barat cukup sulit dan juga penyebaran penduduknya tidak merata namun kita menyadari bahwa untuk menikmati pendidikan itu merupakan hak semua orang, dan negara/pemerintah wajib membiayainya.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat yang dihadapi dengan memperhatikan dari berbagai hal seperti tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Sulawesi Barat dengan berbagai pertimbangan, antara lain: *(1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, (4) kemudahan untuk dikelola*, Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah:

1. Issue tingginya anak Putus Sekolah. ATS Sulbar menurut data BPS tahun 2019 Sebesar 28% atau turun 4% dari tahun 2018. Namun angka absolut masih tergolong tinggi yakni 30 ribuan anak usia 7-18 tahun. Ini angka yang besar karena terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dimasa depan;
2. Issue tenaga Pendidik dan kependidikan, khususnya terkait sertifikasi. Sertifikasi guru kita baru sekitar 15%, artinya perku ada langka dan strategi untuk mendorong peningkatan kualitas guru
3. Issue tentang manajemen sekolah : ini adalah pelaksanaan amanat UU nomor 20 Tahun 2003 .Tentang Sistem pendidikan Nasional. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya berpikir sistem, cara-cara berpikir sistem, dan penerapannya untuk pengelolaan dan pengembangan sekolah sehingga tertanam cara-cara berpikir dan perbuatan yang bersifat holistik/sistemik. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penataran dan pembimbingan.
4. Issue Pengelolaan BOS. BOS adalah Pembiayaan Pendidikan yang sangat vital. Sekolah saat ini menyandarkan sepenuhnya pada sumber ini. Masalah utama di dana BOS adalah tranparansi dan akutabilitas.
5. Isuue tentang Siswa (penerimaan, pembinaan dan Ujian sekolah) target SPM permendagri 100 Tahun 2018 setiap tahun harus 100%.

6. Issue tentang pembelajaran di masa pandemi Covid 19. Masalah saat ini adalah pemantauan dan kepastian belajar anak. Pembelajaran daring masih kurang efektif jika diterapkan di daerah yang belum ada jaringan internet, sekolah yang mempunyai fasilitas kurang dan kesiapan orang tua dalam mendukung anaknya dari segi moril dan materiil masih belum optimal serta guru belum melek teknologi dan kurang kreatif dalam memberikan materi pembelajaran.
7. Issue kompetensi kepala Sekolah, Penerapan Permendiknas RI No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah tidak lepas dari permasalahan. Hal ini ditunjukkan beberapa hasil penelitian bahwa dari lima kompetensi kepala sekolah hampir semuanya masih tergolong lemah.
8. Issue tentang Akreditasi sekolah: akreditasi sekolah merupakan faktor penting untuk memastikan kualitas layanan, olehnya itu semua sekolah wajib ikut akreditasi. Karena akreditasi menjadi salah satu alat ukur bagi siswa untuk lanjut di Perguruan tinggi.

Tabel 3.3
Keadaan Lembaga Pendidikan SD/SMP/SMA dan SMK
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	2017	1.324	355	87	134	23
2	2018	1.327	370	88	137	25
3	2019	1.330	373	88	137	25
4	2020	1,327	378	88	132	25
5	2021	1,326	379	89	131	25

3. Belum optimalnya ketersediaan, kualitas, Pendidikan Menengah (Dikmen) yang terjangkau adil dan merata

Jenjang Pendidikan Menengah merupakan program strategis yang perlu mendapat perhatian serius, karena harus dipersiapkan secara matang dalam memasuki dunia kerja dan studi lanjut. Dengan banyaknya pengangguran di usia produktif, menjadi tantangan kita dalam menyiapkan lulusan SMK yang siap kerja, oleh karena itu pembinaan dan peningkatan kompetensi SMK perlu ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri dan ketersediaan tenaga pendidik secara khusus untuk tenaga pendidik program keahlian produktif karena Perguruan Tinggi yang ada di Sulawesi Barat belum ada mencetak tenaga pendidik untuk program keahlian produktif untuk Sekolah Menengah Kejuruan, hal ini merupakan tantangan dan peluang dalam pemenuhan tenaga pendidik

untuk SMK maka jalan keluarnya dengan melakukan kerjasama dengan semua P4TK di luar Provinsi Sulawesi Barat baik dalam pengembangan karier dan kompetensi tenaga pendidik baik yang sudah ada maupun dalam hal pemenuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

4. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (PLB)

Berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian sampai saat ini Sekolah Luar Biasa (SLB) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota maka sarana prasarana SLB sangat kurang, disamping itu juga peran masyarakat perlu ditingkatkan karena kenyataannya masih ada sebagian orang tua yang malu dan tidak mau menyekolahkan anaknya apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini orang tuanya berada di pedesaan dan tingkat perekonomiannya yang lemah, dan memang sangat sulit sekali untuk memperoleh data tentang jumlah penduduk usia sekolah yang mempunyai kebutuhan khusus.

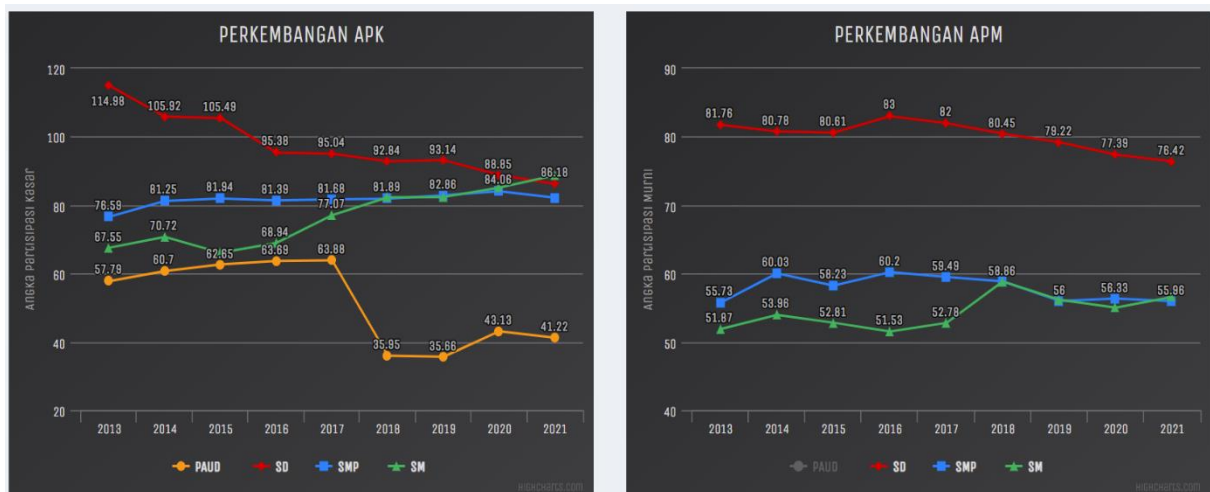
5. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini kualitas pendidik masih rendah khususnya Guru SD/SDLB yang berkualifikasi S1/D4 baru mencapai 65,93%, dan tenaga pendidik PAUD baru 46,58% di tahun 2016. Untuk itu peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik merupakan hal yang utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Sulawesi Barat, dari jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar SD dan Pendidikan Menengah SMA/SMK dan SLB.

3.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, relevansi, keterjangkauan, kualitas, dalam penyelenggaraan Pendidikan. Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, pendidikan dapat dilihat melalui indikator antara lain Pada jenjang pendidikan menengah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 71,22, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK mencapai 86.18 dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK sedangkan baru mencapai 55.98 %.

Gambar 3.1
Trend Capaian Kinerja Pendidikan APK/APM Sulawesi Barat 2013-2021



Pembedaan APK dan APM akan memungkinkan kita untuk mengetahui terjadinya inefisiensi karena terdapatnya anak yang berusia lebih dari usia yang seharusnya baik karena mengulang kelas maupun tidak lulus sekolah.

Terkait pendidik dan tenaga kependidikan adalah masih rendahnya kualitas tenaga pendidik antara lain karena masih banyak tenaga pendidik yang belum bersertifikasi pendidik, dalam hal ini dapat dilihat pada Data Neraca Pendidikan tahun 2020 bahwa tenaga pendidik yang sudah bersertifikasi pada jenjang SMA sekitar 29,1 %, dan SMK sekitar 23,5 %, sedangkan yang sudah bersertifikasi pada jenjang SLB sekitar 16,7%. Dan terkait persentase PTK berdasarkan kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK/SMALB minimal S1/D4 sudah hampir mencapai target 100 %, sebagaimana peraturan yang mewajibkan bahwa kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMK/SMALB minimal S1/D4, dan juga tingkat kompetensi tenaga pendidik sangat perlu ditingkatkan. Selain kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, juga masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti Perpustakaan, Laboratorium, dan lainnya kesemuanya ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Permasalahan inilah yang perlu mendapat perhatian bersama oleh semua pihak.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) **Kurangnya ketersediaan, dan kualitas Pendidikan Menengah (Dikmen) antara lain:**
 - a) Belum terpenuhinya Standar Sarana dan Parasarana Pendidikan sesuai SNP;
 - b) Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 - c) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;

- d) Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan dasar;
- 2) Kurangnya keterjangkauan, relevansi, kualitas Pendidikan Menengah (Dikmen) yang disebabkan oleh:**
 - a) Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah;
 - b) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Menengah;
 - c) Kurangnya Tenaga Pendidik SMK untuk Mata Pelajaran Produktif;
 - d) Belum optimalnya *link and match* antara sekolah dengan dunia usaha dan industri untuk Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
 - f) Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan menengah;
 - g) Belum seluruhnya satuan pendidikan menengah menerapkan Manajemen Mutu;
- 3) Kurangnya ketersediaan, kualitas Pendidikan Khusus antara lain disebabkan oleh:**
 - a) Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana Pendidikan Khusus;
 - b) Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 - c) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan Pendidikan Khusus.
 - d) Kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan ketunaan.
- 4) Kurangnya kualitas dan relevansi pendidik dan tenaga kependidikan yang disebabkan oleh:**
 - a) Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b) Sebagian tenaga pendidik belum memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4;
 - c) Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik;
 - d) Keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e) Honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
 - f) Penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang disandang.
- 5) Kurangnya kepastian dan kualitas layanan pendidikan, yang disebabkan oleh:**
 - a) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b) Belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan;
 - c) Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur;
- 6) Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter yang disebabkan oleh:**

- a) Belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemanfaatan nilai-nilai nasionalisme pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - b) Belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - c) Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti.
- 7) Kurangnya layanan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, antara lain disebabkan:**
- a) Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai;
 - b) Kurangnya sarana dan prasarana aparatur;
 - c) Kurangnya kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur.

Tabel T-B. 35
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

ARAH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2023-2026				
ASPEK	AKAR PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI/KEG
AKSES	Jarak Sekolah Jauh	Meningkatkan Sebaran Sekolah	Persentase Sekolah Perkecamatan	Pembangunan -USB, RKB, Rehab
	Sarana Alat Praktek Masih Sangat Kurang	Penyediaan Sarana, Alat Praktek	Persentase Sekolah yg memiliki Alat Praktek	Pengadaan -Lab. Komp,IPA -Alat Peraga SMK, SLB
MUTU	Nilai UN SMA dan SMK masih Rendah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Guru PNS Berkompetensi	- Persentase Guru yg berkualifikasi S1/D-IV - Pesentase Guru Berkompetensi	-Beasiswa guru -Diklat Kompetensi (UKG) -Pemerataan Guru
	Jumlah Sekolah yang memenuhi SNP masih Rendah	Meningkatkan Mutu Sekolah	Persentase Sekolah terakreditasi min. B	Memperbaiki Saprasi, Meningkatkan kualitas Silabus & Kurikulum)
	Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal	Membuat peta jalan pengembangan SMK (Pendidikan Vokasi)	Persentase Lulusan SMK yang link & match pada DUDI	Menyempurnakan & menyelaraskan kurikulum kebutuhan pengguna lulusan (link and match)

ASPEK	AKAR PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI/KEG
TATA KELOLA	Dukungan Pembiayaan Kurang	Meningkatkan Dukungan Pembiayaan u/ Melanjutkan Pendidikan	Jumlah Siswa Yg Melanjutkan Pendidikan	- Optimalisasi Dana Transfer -Optimalisasi PIP -Beasiswa -BOS
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kepala Sekolah Masih kurang	Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerapkan MBS	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dengan bekerjasama dengan Stake Holder Terkait

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan rumusan masalah dan isu-isu strategis seperti diuraikan pada bab III serta tugas dan fungsi yang diemban untuk periode 2023-2026 maka dapat ditetapkan tujuan dan indikator tujuan / sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Formulasi Pencapaian Tujuan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan Ber-KULIAH (<i>ber-Kolaborasi unggul, Inovatif terhadap Akselerasi Mutu Pendidikan yang Hebat</i>)	Rata-rata Lama Sekolah	dimana RLS adalah rata-rata lama sekolah di suatu wilayah, Xi adalah lama sekolah penduduk ke-ii di suatu wilayah dan nn jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)($i=1,2,3,\dots,n$).
		Harapan Lama Sekolah	Menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas) atau secara matematis rumus harapan lama sekolah dihitung menggunakan rumus: dimana HLS_a^{tHLSat}
2.	Mewujudkan Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Barat	Indek Pembangunan kebudayaan (IPK)	IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi, dan yg terkait dimensi Pendidikan yaitu: Dimensi Pendidikan, Warisan Budaya dan Kebebasan Ekspresi Budaya

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya guna mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat seperti tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu pada tujuan RPD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 memiliki 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran yang di dukung oleh 11 (sebelas) Program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 :

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
	Tujuan						
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan Ber-KULIAH (ber-Kolaborasi unggul, Inovatif terhadap Akselerasi Mutu Pendidikan yang Hebat)	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.21	13.44	13.64	13.87
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.18	8.32	8.44	8.58
	Mewujudkan Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Barat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persentase	49.31	49.53	49.76	49.99
	Sasaran						
	Terpenuhinya Layanan Dasar Pendidikan pada Jenjang Menengah dan Pendidikan Khusus (SLB)	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Persentase	100	100	100	100
		Persentase Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persentase	100	100	100	100
	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid Satuan Pendidikan Menengah	Rasio	1:22	1:20	1:19	1:17
		Rasio Guru/Murid Satuan Pendidikan Khusus	Rasio	1:6	1:5	1:5	1:4
		Persentase Pendidik & Tenaga Kependidikan bersertifikat profesi	Persentase	79.06	86.72	93.36	99.90
	Meningkatnya Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata dikembangkan dan dilestarikan dan di Lestarkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata dikembangkan dan di Lestarkan	Persentase	45.60	50.16	57.68	69.22

Rencana Strategi 2023-2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
	Terlaksananya sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan Akuntabel	- Nilai SAKIP - Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Nilai	B B	BB BB	A A	A A
	PROGRAM						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	A	A
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA	Persentase	44.06	48.46	53.31	58.64
		Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B	Persentase	84.75	88.99	93.44	98.11
		Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi	Persentase	87.87	89.70	92.39	95.16
		Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi	Persentase	37.42	39.82	42.23	44.63
		Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.85	1.90	2.00	2.20
		Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1.85	1.90	2.00	2.20
3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Persentase	71.40	77.11	83.28	89.94
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan	Persentase	82.74	86.88	91.22	95.78
		Jumlah PTK yang memenuhi Kualifikasi Sertifikasi	Orang	1548	1698	1828	1958

Rencana Strategi 2023-2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
		Rasio Guru PNS : Murid SMA	Nilai Rasio	1:40	1:30	1:25	1:20
		Rasio Guru PNS : Murid SMK	Nilai Rasio	1:35	1:30	1:25	1:20
		Rasio Guru PNS : Murid SLB	Nilai Rasio	1:27	1:25	1:20	1:15
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	49.54	54.50	59.95	65.94
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persentase	7107	7462	7835	8227
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan	Persentase	90.14	92.85	95.63	98.50
8	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persentase	76.00	78.28	80.63	83.05
9	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan	Persentase	87.59	90.22	92.93	95.71
10	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persentase	91.21	93.94	96.76	99.66
11	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Persentase	91.04	92.86	94.71	96.61

4.1 Strategi

Untuk dapat mewujudkan tujuan Pembangunan Bidang pendidikan di provinsi Sulawesi Barat, maka setiap 5 tahun masa jabatan Gubernur perlu merumuskan tujuan dan sasaran konkrit yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 -2026 adalah:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berKULIAH , dengan sasaran sebagai berikut:**
 - a. Terpenuhinya layanan dasar pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan khusus
 - b. Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Terlaksananya sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan Akuntabel
2. **Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah, dengan sasaran sebagai berikut:**
 - a. Meningkatnya Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata dikembangkan dan dilestarikan dan di Lestarkan.
 - b. pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah
3. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut:**
 - a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif
 - b. Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 2023 - 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan Ber-KULIAH (<i>ber-Kolaborasi unggul, Inovatif terhadap Akselerasi Mutu Pendidikan yang Hebat</i>)	Terpenuhinya Layanan Dasar Pendidikan pada Jenjang Menengah dan Pendidikan Khusus (SLB)	Peningkatan layanan akses pendidikan menengah atas/vokasi, pendidikan khusus dan layanan khusus	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta sarana penunjang lainnya bagi sekolah menengah dan pendidikan khusus dan Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan
		Peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi	Menyiapkan bantuan beasiswa berprestasi dan kurang mampu serta program beasiswa S1,S2 dan S3
		Peningkatan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan SMK terhadap DUDI/IDUKA	Menfasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Industri dan Dunia Kerja
		Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan antar satuan pendidikan dan kebudayaan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan antar satuan pendidikan dan kebudayaan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat
		Penanganan Anak Tidak Sekolah semua Jenjang Pendidikan	Penguatan Pelaksanaan Penerapan SPM Pendidikan dengan melakukan Kerjasama berbagai pihak terkait dari tingkat Provinsi sampai Tingkat Kabupaten
		Peningkatan Kualitas/Mutu dan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan pada masing-masing Satuan Pendidikan.	Meningkatkan kinerja guru dan tendik melalui pembinaan berkelanjutan kepada guru dan tendik sehingga terbentuk guru dan tendik yang meningkat kinerjanya mampu memiliki pengetahuan di bidangnya dengan baik dan kualitas sikapnya dari waktu ke waktu meningkat
		Pengelolaan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan yang berbasis data dan SIM	Mendayagunakan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan yang berbasis data dan SIM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik memenuhi standar kualifikasi S1/DIV dan Sertifikasi guru dan kepala sekolah dan berkesetaraan Gender	Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan melalui pemenuhan standar kualifikasi S1/DIV Guru dan Tenaga Kependidikan serta Sertifikasi guru dan kepala sekolah, dan berkesetaraan Gender
		Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan (GTK) Melalui Kemitraan	Penguatan Peran yang aktif Pemerintah/Lembaga, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
	Terlaksananya sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan Akuntabel	Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif;	Meningkatkan tata kelola layanan administrasi dan public urusan pendidikan dan kebudayaan yang bersih, transparan dan akuntabel. yang lebih efektif dan efisien
		Peningkatan dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi menuju Good Governance;	Meningkatkan tata kelola Sumber daya Aparatur, Pengelolaan Anggaran dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien.
Mewujudkan Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Barat	Meningkatnya Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata dikembangkan dan dilestarikan dan di Lestarkan	Peningkatan penguatan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan peningkatan partisipasi kelembagaan seni budaya	Meningkatkan penguatan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan peningkatan partisipasi kelembagaan seni budaya
		Peningkatan ketahanan budaya dan kekayaan budaya daerah	Meningkatkan ketahanan budaya dan pengelolaan kekayaan budaya daerah
		Peningkatan ketahanan budaya dan berkembangnya keragaman budaya daerah	Meningkatkan ketahanan budaya dan pengelolaan keragaman budaya daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja, keluaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta indikator kunci pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Barat sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat guna menjadikan Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq.

5.1 Rencana Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, melaksanakan disiplin aparatur dalam rangka peningkatan kinerja aparatur, meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Negara sehingga mempunyai dedikasi. Indikator utama program ini

- Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai (Persen)
- Nilai SAKIP OPD (Poin)
- Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD (Skala Likert)
- Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD (Persen).

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Tujuan utama Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus adalah tersedia dan terjangkau layanan pendidikan bermutu, relevan, dan berkesetaraan bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan khusus. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan pelaksanaan manajemen pendidikan SMA berkompeten, penyediaan dan pengembangan system pembelajaran, informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan menengah, Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas berkualitas dan merata, penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA yang berkualitas, dan Penyediaan Subsidi Pembiayaan untuk menerapkan system pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas dan merata.

Sedangkan Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan adalah penguatan Sekolah Menengah Kejuruan dengan pengembangan mental dan akhlak mulia ke Siswa SMK, menumbuhkan kembangkan disiplin dan tanggungjawab terhadap kegiatan di SMK, terciptanya generasi muda yang tangguh dan siap menuju ke kehidupan yang lebih baik di masyarakat, memiliki budi pekerti dan kebersamaan sebagai upaya untuk menggalang persatuan dan kesatuan generasi muda, meningkatkan jumlah dan kualitas peserta didik, meringankan biaya pendidikan siswa SMK, mencegah Siswa Miskin SMK untuk putus sekolah, meningkatkan daya tampung SMK dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK.

Tujuan Selanjutnya memberikan layanan pendidikan khusus kepada Siswa-Siswi yang memiliki kemampuan khusus atau keterbelakangan mental dan fisik untuk dapat merasakan dan mengenal pendidikan, pemberian bantuan alat peraga bagi siswa berkebutuhan khusus dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan khusus. Program ini juga bertujuan untuk Pengembangan Karir PTK dan memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna mengembangkan metedo pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu Pendidikan melalui Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

4. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dengan pemberian bantuan beasiswa kualifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga Kependidikan, Pedistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PendidikanMenengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan (Persen)

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai Budaya di Provinsi Sulawesi Barat di Satuan Pendidikan maupun masyarakat untuk dapat melestarikan dan mengembangkan budaya Lokal agar bisa dikenal oleh Dunia Internasional.

6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola kekayaan budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, menggali dan melestarikan kekayaan budaya Mandar

dan budaya lainnya di Sulawesi Barat, Peningkatan Seni Budaya Mandar dan budaya lainnya di Sulawesi Barat, pengembangan film budaya daerah, dan Pengembangan Sanggar Seni dan budaya di Provinsi Sulawesi Barat, pengembangan alat musik tradisional mandar.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai Budaya di Provinsi Sulawesi Barat di Satuan Pendidikan maupun masyarakat untuk dapat melestarikan dan mengembangkan budaya Lokal agar bisa dikenal oleh Dunia Internasional.

7. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai budaya di masyarakat, pelestarian kekayaan budayaan, arkeologi lokal, serta promosi kekayaan budaya lokal.

8. Program Pembinaan Sejarah baru

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai budaya di masyarakat, pelestarian kekayaan budayaan, arkeologi lokal, serta promosi kekayaan budaya lokal.

9. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai budaya di masyarakat, pelestarian kekayaan budayaan, arkeologi lokal, serta promosi kekayaan budaya lokal.

10. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai budaya di masyarakat, pelestarian kekayaan budayaan, arkeologi lokal, serta promosi kekayaan budaya lokal.

11. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Program ini bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SDLB/ SMPLB/SMALB negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI), Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih, Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

5.2 Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

Keberhasilan dari Program dan Kegiatan dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel T-C.27. (***Terlampir***)

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan pernyataan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap Bidang dan Unit Pelaksana Teknis agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran Organisasi Perangkat Daerah, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat Eselon II maupun di tingkat Eselon III. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat OPD, program, dan kegiatan dalam periode 2023-2026. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharapkan untuk menetapkan satu program dengan satu atau lebih sasaran program yang dilengkapi dengan IKP untuk tiap-tiap sasaran program. Sementara itu Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimungkinkan memiliki satu atau lebih kegiatan, dimana masing-masing kegiatan memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Target kinerja program di setiap Bidang dan UPTD dan target kinerja kegiatan di seluruh Sub Bagian dan Seksi harus mencerminkan target kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Strategi 2023-2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, sekaligus memberikan gambaran pembiayaan yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang. Secara teknis sesuai dengan pedoman yang ada, Renstra disusun dengan menggunakan berbagai asumsi (misalnya pertumbuhan ekonomi), serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBD, sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2023-2026). Penjelasan dari setiap target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, adalah Target Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan, dapat dilihat pada Tabel T-C.28, sebagai berikut:

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7.27	7.42	7.63	7.75	7.82	7.96
3	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.41	12.49	12.51	12.69	12.71	12.81
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	40.46	20.064	23.604	26.307	28.304	30.572
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	100	100	100	100	100	34.252
6	Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/SLB	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	67.23	67.3	100	100	100	89.45
7	Persentase Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	67.69	67.69	100	100	100	82.28
10	Persentase Guru yang memenuhi standar kualifikasi S1/D IV	93.32	1.4	96.12	97.52	98.92	100.32

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
11	Persentase Guru yang memenuhi standar kualifikasi sertifikasi guru/kepala sekolah	31.63	11.8	55.23	67.03	78.83	90.63
12	Persentase PTK yang terdistribusi sesuai kebutuhan	15.91	15.91	17.5	19.25	35	86.71
13	Jumlah Nilai Budaya dan Kearifan lokal yang terdokumentasi	31	33	33	34	35	35
14	Jumlah Taman Budaya dan Mesuem yang dikembangkan	0	1	1	2	1	6
15	Jumlah Situs dan Cagar Budaya serta Kepurbakalan yang dilestarikan	63	65	65	65	65	65
16	Jumlah Bangunan Rumah Adat, Taman Budaya dan Museum yang dibangun dan direhabilitasi	4	6	6	6	6	6
17	Nilai SAKIP	75	80	85	90	95	100
18	Nilai Reformasi Birokrasi	75	80	85	90	95	100

Renstra Tahun 2023-2026 disusun berpedoman pada Instruksi MENDAGRI RI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dengan ini, Renstra Tahun 2023-2026 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta dokumen perencanaan lainnya di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional.

Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat guna mendukung pencapaian sasaran. Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan Sulawesi Barat selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2023-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat untuk mengedepankannya, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan OPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mencerdaskan masyarakat. Sehingga dengan demikian pembangunan pendidikan akan dapat berlangsung secara terintegrasi antar sektor, bermutu, dan memiliki akselerasi tinggi, yang

pada akhirnya akan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian masyarakat Sulawesi Barat yang maju dan *malaqbiq*.

Berdasarkan kaidah transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022, dimana masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 berakhir pada bulan Mei 2022, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Mei 2022. Oleh karena itu dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masa jabatan tahun 2023-2027. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026.

Dalam kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra OPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra OPD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra OPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Pendidikan;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

5. Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan melalui Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat per-triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renestra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pendidikan.
7. Dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Pendidikan periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Pendidikan jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat																									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah PenangggungJawa	KET		
												Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	3						4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18		
Mewujudkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan Ber-KULIAH (Ber-Kolaborasi Unggul, Inovatif Terhadap akselerasi Pendidikan yang Hebat)	- Terlaksananya sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan Akuntabel	- Nilai SAKIP - Nilai Reformasi Birokrasi	1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP		100 Persen	331,355,352,003	100 Persen	335,360,637,274	100 Persen	339,489,209,685	100 Persen	343,826,981,534	100 Persen	1,350,032,180,497	Dikbud	Sulbar		
			1	01	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	100 Persen	1,936,000,000	100 Persen	2,129,600,000	100 Persen	2,342,560,000	100 Persen	2,576,816,000	100 Persen	8,984,976,000	Sekretaris		
			1	01	01	1	01	1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000		
			1	01	01	1	01	2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	66,000,000	100 Persen	72,600,000	100 Persen	79,860,000	100 Persen	87,846,000	100 Persen	306,306,000		
			1	01	01	1	01	3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	66,000,000	100 Persen	72,600,000	100 Persen	79,860,000	100 Persen	87,846,000	100 Persen	306,306,000		
			1	01	01	1	01	4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	33,000,000	100 Persen	36,300,000	100 Persen	39,930,000	100 Persen	43,923,000	100 Persen	153,153,000		
			1	01	01	1	01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	22,000,000	100 Persen	24,200,000	100 Persen	26,620,000	100 Persen	29,282,000	100 Persen	102,102,000					
			1	01	01	1	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	16,500,000	100 Persen	18,150,000	100 Persen	19,965,000	100 Persen	21,961,500	100 Persen	76,576,500					
			1	01	01	1	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	632,500,000	100 Persen	695,750,000	100 Persen	765,325,000	100 Persen	841,857,500	100 Persen	2,935,432,500					
			1	01	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD		100 Persen	316,062,126,952	100 Persen	319,445,993,221	100 Persen	322,886,022,653	100 Persen	326,385,009,330	100 Persen	1,284,779,152,156	Sekretaris				
			1	01	01	1	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	313,581,626,952	100 Persen	316,717,443,221	100 Persen	319,884,617,653	100 Persen	323,083,463,830	100 Persen	1,273,267,151,656					
			1	01	01	1	02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen	2,310,000,000	100 Persen	2,541,000,000	100 Persen	2,795,100,000	100 Persen	3,074,610,000	100 Persen	10,720,710,000					
			1	01	01	1	02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Persen	55,000,000	100 Persen	60,500,000	100 Persen	66,550,000	100 Persen	73,205,000	100 Persen	255,255,000					
			1	01	01	1	02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 Persen	55,000,000	100 Persen	60,500,000	100 Persen	66,550,000	100 Persen	73,205,000	100 Persen	255,255,000					
			1	01	01	1	02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	11,000,000	100 Persen	12,100,000	100 Persen	13,310,000	100 Persen	14,641,000	100 Persen	51,051,000					
			1	01	01	1	02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100 Persen	11,000,000	100 Persen	12,100,000	100 Persen	13,310,000	100 Persen	14,641,000	100 Persen	51,051,000					
			1	01	01	1	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Persen	38,500,000	100 Persen	42,350,000	100 Persen	46,585,000	100 Persen	51,243,500	100 Persen	178,678,500					
			1	01	01	1	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD		100 Persen	500,500,000	100 Persen	550,550,000	100 Persen	605,605,000	100 Persen	666,165,500	100 Persen	2,322,820,500	Sekretaris				
			1	01	01	1	03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 Persen	55,000,000	100 Persen	60,500,000	100 Persen	66,550,000	100 Persen	73,205,000	100 Persen	255,255,000					
			1	01	01	1	03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 Persen	88,000,000	100 Persen	96,800,000	100 Persen	106,480,000	100 Persen	117,128,000	100 Persen	408,408,000					
			1	01	01	1	03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000					
			1	01	01	1	03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen	132,000,000	100 Persen	145,200,000	100 Persen	159,720,000	100 Persen	175,692,000	100 Persen	612,612,000					
			1	01	01	1	03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen	77,000,000	100 Persen	84,700,000	100 Persen	93,170,000	100 Persen	102,487,000	100 Persen	357,357,000					
			1	01	01	1	03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Persen	38,500,000	100 Persen	42,350,000	100 Persen	46,585,000	100 Persen	51,243,500	100 Persen	178,678,500					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET	
											Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
			1	2	3	4	5				6	8	9	7	8	9	10	11	12	17			18
			1	01	01	1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup SKPD		100 Persen	1,105,434,000	100 Persen	1,215,977,400	100 Persen	1,337,575,140	100 Persen	1,471,332,654	100 Persen	5,130,319,194	Sekretaris		
			1	01	01	1	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000			
			1	01	01	1	05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000		
			1	01	01	1	05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000		
			1	01	01	1	05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000		
			1	01	01	1	05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 Persen	115,434,000	100 Persen	126,977,400	100 Persen	139,675,140	100 Persen	153,642,654	100 Persen	535,729,194		
			1	01	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD		100 Persen	1,493,191,052	100 Persen	1,501,606,653	100 Persen	1,525,845,892	100 Persen	1,636,096,951	100 Persen	6,156,740,547	Sekretaris		
			1	01	01	1	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100 Persen	5,000,000	100 Persen	5,000,000	100 Persen	5,000,000	100 Persen	10,000,000	100 Persen	25,000,000		
			1	01	01	1	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100 Persen	125,000,000	100 Persen	126,875,000	100 Persen	129,000,000	100 Persen	137,127,000	100 Persen	518,002,000		
			1	01	01	1	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100 Persen	150,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	150,000,000	100 Persen	175,000,000	100 Persen	625,000,000		
			1	01	01	1	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100 Persen	65,000,000	100 Persen	65,000,000	100 Persen	68,000,000	100 Persen	80,000,000	100 Persen	278,000,000		
			1	01	01	1	06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		100 Persen	120,000,000	100 Persen	120,000,000	100 Persen	125,000,000	100 Persen	140,000,000	100 Persen	505,000,000		
			1	01	01	1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Persen	861,691,052	100 Persen	865,781,653	100 Persen	876,845,892	100 Persen	911,133,951	100 Persen	3,515,452,547		
			1	01	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 Persen	16,500,000	100 Persen	16,700,000	100 Persen	17,000,000	100 Persen	18,071,000	100 Persen	68,271,000		
			1	01	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100 Persen	150,000,000	100 Persen	152,250,000	100 Persen	155,000,000	100 Persen	164,765,000	100 Persen	622,015,000		
			1	01	01	1	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1,288,100,000	100 Persen	1,416,910,000	100 Persen	1,558,601,000	100 Persen	1,714,461,100	100 Persen	5,978,072,100	Sekretaris		
			1	01	01	1	07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		100 Persen	298,100,000	100 Persen	327,910,000	100 Persen	360,701,000	100 Persen	396,771,100	100 Persen	1,383,482,100		
			1	01	01	1	07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000		
			1	01	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100 Persen	357,500,000	100 Persen	393,250,000	100 Persen	432,575,000	100 Persen	475,832,500	100 Persen	1,659,157,500		
			1	01	01	1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100 Persen	357,500,000	100 Persen	393,250,000	100 Persen	432,575,000	100 Persen	475,832,500	100 Persen	1,659,157,500		
			1	01	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	7,890,000,000	100 Persen	7,928,000,000	100 Persen	7,964,300,000	100 Persen	8,004,230,000	100 Persen	31,786,530,000	Sekretaris		
			1	01	01	1	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 Persen	7,500,000,000	100 Persen	7,500,000,000	100 Persen	7,500,000,000	100 Persen	7,500,000,000	100 Persen	30,000,000,000		
			1	01	01	1	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100 Persen	60,000,000	100 Persen	65,000,000	100 Persen	65,000,000	100 Persen	65,000,000	100 Persen	255,000,000		
			1	01	01	1	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000		
			1	01	01	1	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000		
			1	01	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1,080,000,000	100 Persen	1,172,000,000	100 Persen	1,268,700,000	100 Persen	1,372,870,000	100 Persen	4,893,570,000	Sekretaris		
			1	01	01	1	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000		
			1	01	01	1	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100 Persen	250,000,000	100 Persen	260,000,000	100 Persen	265,000,000	100 Persen	265,000,000	100 Persen	1,040,000,000		
			1	01	01	1	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 Persen	40,000,000	100 Persen	40,000,000	100 Persen	42,000,000	100 Persen	43,000,000	100 Persen	165,000,000		
			1	01	01	1	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 Persen	20,000,000	100 Persen	25,000,000	100 Persen	30,000,000	100 Persen	40,000,000	100 Persen	115,000,000		
			1	01	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET	
											Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
											8	9	7	8	9	10	11	12	17	18			
1	2	3	3					4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18	
			1	01	01	1	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000		
	- Terpenuhinya Layanan Dasar Pendidikan pada Jenjang Menengah dan Pendidikan Khusus (SLB) - Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah - Persentase Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus - Persentase Pendidik & Tenaga Kependidikan bersertifikat profesi	1		01	02	1		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Persentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA - Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B - Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi - Persentase PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi - Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional - Rata-rata kompetensi Literasi dan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 Persen	227,634,294,360	100 Persen	250,397,723,796	100 Persen	275,437,496,176	100 Persen	302,981,245,793	100 Persen	1,056,450,760,125	Pendidikan Menengah dan Khusus		
			1	01	02	1	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Layanan pendidikan SMA yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan	100 Persen	110,684,420,000	100 Persen	121,752,862,000	100 Persen	133,928,148,200	100 Persen	147,320,963,020	100 Persen	513,686,393,220	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	100 Persen	16,500,000,000	100 Persen	18,150,000,000	100 Persen	19,965,000,000	100 Persen	21,961,500,000	100 Persen	76,576,500,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Persen	1,650,000,000	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	7,657,650,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	100 Persen	2,750,000,000	100 Persen	3,025,000,000	100 Persen	3,327,500,000	100 Persen	3,660,250,000	100 Persen	12,762,750,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	100 Persen	4,950,000,000	100 Persen	5,445,000,000	100 Persen	5,989,500,000	100 Persen	6,588,450,000	100 Persen	22,972,950,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	100 Persen	5,500,000,000	100 Persen	6,050,000,000	100 Persen	6,655,000,000	100 Persen	7,320,500,000	100 Persen	25,525,500,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	100 Persen	6,050,000,000	100 Persen	6,655,000,000	100 Persen	7,320,500,000	100 Persen	8,052,550,000	100 Persen	28,078,050,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	100 Persen	2,420,000,000	100 Persen	2,662,000,000	100 Persen	2,928,200,000	100 Persen	3,221,020,000	100 Persen	11,231,220,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	100 Persen	2,200,000,000	100 Persen	2,420,000,000	100 Persen	2,662,000,000	100 Persen	2,928,200,000	100 Persen	10,210,200,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	9	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	100 Persen	4,400,000,000	100 Persen	4,840,000,000	100 Persen	5,324,000,000	100 Persen	5,856,400,000	100 Persen	20,420,400,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	100 Persen	2,200,000,000	100 Persen	2,420,000,000	100 Persen	2,662,000,000	100 Persen	2,928,200,000	100 Persen	10,210,200,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	100 Persen	1,650,000,000	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	7,657,650,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Persen	1,521,300,000	100 Persen	1,673,430,000	100 Persen	1,840,773,000	100 Persen	2,024,850,300	100 Persen	7,060,353,300	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	100 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	100 Persen	880,000,000	100 Persen	968,000,000	100 Persen	1,064,800,000	100 Persen	1,171,280,000	100 Persen	4,084,080,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	100 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	22,000,000,000	100 Persen	24,200,000,000	100 Persen	26,620,000,000	100 Persen	29,282,000,000	100 Persen	102,102,000,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	1,650,000,000	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	7,657,650,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	1,650,000,000	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	7,657,650,000	Bidang Pembinaan SMA		
			1	01	02	1	01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	990,000,000	100 Persen	1,089,000,000	100 Persen	1,197,900,000	100 Persen	1,317,690,000	100 Persen	4,594,590,000	Bidang Pembinaan SMA		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023										2024										2025										2026										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET
							Target		Rp (Juta)		Target		Rp (Juta)		Target		Rp (Juta)		Target		Rp (Juta)		Target		Rp (Juta)		Target		Rp (Juta)																					
							8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18																																
1	2	3	3				4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18																													
			1	01	02	1	01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	682,000,000	100 Persen	750,200,000	100 Persen	825,220,000	100 Persen	907,742,000	100 Persen	3,165,162,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	805,255,000	100 Persen	2,807,805,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	798,600,000	100 Persen	878,460,000	100 Persen	3,063,060,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	880,000,000	100 Persen	968,000,000	100 Persen	1,064,800,000	100 Persen	1,171,280,000	100 Persen	4,084,080,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	798,600,000	100 Persen	878,460,000	100 Persen	3,063,060,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	2,310,000,000	100 Persen	2,541,000,000	100 Persen	2,795,100,000	100 Persen	3,074,610,000	100 Persen	10,720,710,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	798,600,000	100 Persen	878,460,000	100 Persen	3,063,060,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	2,552,550,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	100 Persen	1,650,000,000	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	7,657,650,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	100 Persen	495,000,000	100 Persen	544,500,000	100 Persen	598,950,000	100 Persen	658,845,000	100 Persen	2,297,295,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	2,552,550,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	100 Persen	187,000,000	100 Persen	205,700,000	100 Persen	226,270,000	100 Persen	248,897,000	100 Persen	867,867,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Persen	4,053,500,000	100 Persen	4,458,850,000	100 Persen	4,904,735,000	100 Persen	5,395,208,500	100 Persen	18,812,293,500	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Persen	1,650,000,000	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	7,657,650,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Persen	5,500,000,000	100 Persen	6,050,000,000	100 Persen	6,655,000,000	100 Persen	7,320,500,000	100 Persen	25,525,500,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	2,552,550,000	Bidang Pembinaan SMA, UPTD BPTIK PK																													
			1	01	02	1	01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Persen	495,000,000	100 Persen	544,500,000	100 Persen	598,950,000	100 Persen	658,845,000	100 Persen	2,297,295,000	Bidang Pembinaan SMA, Bidang PTK, UPTD BPTIK PK																													
			1	01	02	1	01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Persen	2,490,620,000	100 Persen	2,739,682,000	100 Persen	3,013,650,200	100 Persen	3,315,015,220	100 Persen	11,558,967,420	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Pembinaan SMA																													
			1	01	02	1	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Layanan pendidikan SMK yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan	100 Persen	92,774,954,360	100 Persen	102,052,449,796	100 Persen	112,257,694,776	100 Persen	123,483,464,253	100 Persen	430,568,563,185	Bidang Pembinaan SMK																													
			1	01	02	1	02	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	100 Persen	16,500,000,000	100 Persen	18,150,000,000	100 Persen	19,965,000,000	100 Persen	21,961,500,000	100 Persen	76,576,500,000	Bidang Pembinaan SMK																													
			1	01	02	1	02	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Persen	880,000,000	100 Persen	968,000,000	100 Persen	1,064,800,000	100 Persen	1,171,280,000	100 Persen	4,084,080,000	Bidang Pembinaan SMK																													

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023										2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET	
							Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)							
1	2	3	3				4	5	6	8	9		7	8		9	10		11	12		17	18		17	18	
			1	01	02	1	02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		100 Persen	990,000,000		100 Persen	1,089,000,000		100 Persen	1,197,900,000		100 Persen	1,317,690,000		100 Persen	4,594,590,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun		100 Persen	17,600,000,000		100 Persen	19,360,000,000		100 Persen	21,296,000,000		100 Persen	23,425,600,000		100 Persen	81,681,600,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	5	Pembangunan Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		100 Persen	9,350,000,000		100 Persen	10,285,000,000		100 Persen	11,313,500,000		100 Persen	12,444,850,000		100 Persen	43,393,350,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	2,200,000,000		100 Persen	2,420,000,000		100 Persen	2,662,000,000		100 Persen	2,928,200,000		100 Persen	10,210,200,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	1,650,000,000		100 Persen	1,815,000,000		100 Persen	1,996,500,000		100 Persen	2,196,150,000		100 Persen	7,657,650,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	8	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		100 Persen	1,320,000,000		100 Persen	1,452,000,000		100 Persen	1,597,200,000		100 Persen	1,756,920,000		100 Persen	6,126,120,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	9	Pembangunan Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	2,200,000,000		100 Persen	2,420,000,000		100 Persen	2,662,000,000		100 Persen	2,928,200,000		100 Persen	10,210,200,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	1,705,000,000		100 Persen	1,875,500,000		100 Persen	2,063,050,000		100 Persen	2,269,355,000		100 Persen	7,912,905,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		100 Persen	165,000,000		100 Persen	181,500,000		100 Persen	199,650,000		100 Persen	219,615,000		100 Persen	765,765,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	12	Pembangunan Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	330,000,000		100 Persen	363,000,000		100 Persen	399,300,000		100 Persen	439,230,000		100 Persen	1,531,530,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	440,000,000		100 Persen	484,000,000		100 Persen	532,400,000		100 Persen	585,640,000		100 Persen	2,042,040,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun		100 Persen	440,000,000		100 Persen	484,000,000		100 Persen	532,400,000		100 Persen	585,640,000		100 Persen	2,042,040,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	7,700,000,000		100 Persen	8,470,000,000		100 Persen	9,317,000,000		100 Persen	10,248,700,000		100 Persen	35,735,700,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	660,000,000		100 Persen	726,000,000		100 Persen	798,600,000		100 Persen	878,460,000		100 Persen	3,063,060,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	4,400,000,000		100 Persen	4,840,000,000		100 Persen	5,324,000,000		100 Persen	5,856,400,000		100 Persen	20,420,400,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	385,000,000		100 Persen	423,500,000		100 Persen	465,850,000		100 Persen	512,435,000		100 Persen	1,786,785,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	275,000,000		100 Persen	302,500,000		100 Persen	332,750,000		100 Persen	366,025,000		100 Persen	1,276,275,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	495,000,000		100 Persen	544,500,000		100 Persen	598,950,000		100 Persen	658,845,000		100 Persen	2,297,295,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	495,000,000		100 Persen	544,500,000		100 Persen	598,950,000		100 Persen	658,845,000		100 Persen	2,297,295,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	275,000,000		100 Persen	302,500,000		100 Persen	332,750,000		100 Persen	366,025,000		100 Persen	1,276,275,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	23	Rehabilitasi Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	1,650,000,000		100 Persen	1,815,000,000		100 Persen	1,996,500,000		100 Persen	2,196,150,000		100 Persen	7,657,650,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	330,000,000		100 Persen	363,000,000		100 Persen	399,300,000		100 Persen	439,230,000		100 Persen	1,531,530,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	165,000,000		100 Persen	181,500,000		100 Persen	199,650,000		100 Persen	219,615,000		100 Persen	765,765,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	220,000,000		100 Persen	242,000,000		100 Persen	266,200,000		100 Persen	292,820,000		100 Persen	1,021,020,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	550,000,000		100 Persen	605,000,000		100 Persen	665,500,000		100 Persen	732,050,000		100 Persen	2,552,550,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	28	Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia		100 Persen	143,000,000		100 Persen	157,300,000		100 Persen	173,030,000		100 Persen	190,333,000		100 Persen	663,663,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		100 Persen	165,000,000		100 Persen	181,500,000		100 Persen	199,650,000		100 Persen	219,615,000		100 Persen	765,765,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		100 Persen	132,000,000		100 Persen	145,200,000		100 Persen	159,720,000		100 Persen	175,692,000		100 Persen	612,612,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		100 Persen	110,000,000		100 Persen	121,000,000		100 Persen	133,100,000		100 Persen	146,410,000		100 Persen	510,510,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia		100 Persen	165,000,000		100 Persen	181,500,000		100 Persen	199,650,000		100 Persen	219,615,000		100 Persen	765,765,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		100 Persen	4,510,000,000		100 Persen	4,961,000,000		100 Persen	5,457,100,000		100 Persen	6,002,810,000		100 Persen	20,930,910,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		100 Persen	1,650,000,000		100 Persen	1,815,000,000		100 Persen	1,996,500,000		100 Persen	2,196,150,000		100 Persen	7,657,650,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		100 Persen	5,086,914,360		100 Persen	5,595,605,796		100 Persen	6,155,166,376		100 Persen	6,770,683,013		100 Persen	23,608,369,545		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		100 Persen	330,000,000		100 Persen	363,000,000		100 Persen	399,300,000		100 Persen	439,230,000		100 Persen	1,531,530,000		Bidang Pembinaan SMK	
			1	01	02	1	02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan		100 Persen	110,000,000		100 Persen	121,000,000		100 Persen	133,100,000		100 Persen	146,410,000		100 Persen	510,510,000		Bidang Pembinaan SMK	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangggungjawa	KET
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	3	3	4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18
			1010210241	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	2,552,550,000	Bidang Pembinaan SMK	
			1010210242	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		100 Persen	495,000,000	100 Persen	544,500,000	100 Persen	598,950,000	100 Persen	658,845,000	100 Persen	2,297,295,000	Bidang Pembinaan SMK	
			1010210243	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	798,600,000	100 Persen	878,460,000	100 Persen	3,063,060,000	Bidang Pembinaan SMK, Bidang PTK, UPTD BPTIK PK	
			1010210244	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun		100 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000	Bidang Pembinaan SMK	
			1010210245	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		100 Persen	3,648,040,000	100 Persen	4,012,844,000	100 Persen	4,414,128,400	100 Persen	4,855,541,240	100 Persen	16,930,553,640	Bidang Pembinaan SMK	
			1010210246	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Pembinaan SMK	
			1010210247	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		100 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000	Bidang Pembinaan SMK	
			10102103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Layanan Pendidikan Khusus yang telah dikelola dengan baik sesuai Standar Nasional Pendidikan		100 Persen	24,174,920,000	100 Persen	26,592,412,000	100 Persen	29,251,653,200	100 Persen	32,176,818,520	100 Persen	112,195,803,720	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021031	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		100 Persen	2,750,000,000	100 Persen	3,025,000,000	100 Persen	3,327,500,000	100 Persen	3,660,250,000	100 Persen	12,762,750,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021032	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	2,552,550,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021033	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		100 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	798,600,000	100 Persen	878,460,000	100 Persen	3,063,060,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021034	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021035	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021036	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		100 Persen	770,000,000	100 Persen	847,000,000	100 Persen	931,700,000	100 Persen	1,024,870,000	100 Persen	3,573,570,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021037	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021038	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			101021039	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1010210310	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1010210311	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		100 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1010210312	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penangggungjawa	KET
												2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode			
												Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	3						4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18
			1	01	02	1	03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	3,300,000,000	100 Persen	3,630,000,000	100 Persen	3,993,000,000	100 Persen	4,392,300,000	100 Persen	15,315,300,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	990,000,000	100 Persen	1,089,000,000	100 Persen	1,197,900,000	100 Persen	1,317,690,000	100 Persen	4,594,590,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	286,000,000	100 Persen	314,600,000	100 Persen	346,060,000	100 Persen	380,666,000	100 Persen	1,327,326,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	770,000,000	100 Persen	847,000,000	100 Persen	931,700,000	100 Persen	1,024,870,000	100 Persen	3,573,570,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	187,000,000	100 Persen	205,700,000	100 Persen	226,270,000	100 Persen	248,897,000	100 Persen	867,867,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	2,552,550,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia		100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		100 Persen	770,000,000	100 Persen	847,000,000	100 Persen	931,700,000	100 Persen	1,024,870,000	100 Persen	3,573,570,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangggungjawa	KET
												Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
												8	9	7	8	9	10	11	12	17	18		
1	2	3	3						4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18
			1	01	02	1	03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		100 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	2,552,550,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		100 Persen	495,000,000	100 Persen	544,500,000	100 Persen	598,950,000	100 Persen	658,845,000	100 Persen	2,297,295,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas, Bidang PTK	
			1	01	02	1	03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		100 Persen	931,920,000	100 Persen	1,025,112,000	100 Persen	1,127,623,200	100 Persen	1,240,385,520	100 Persen	4,325,040,720	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	02	1	03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD & Dikdas	
			1	01	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		100 Persen	2,161,500,000	100 Persen	2,377,650,000	100 Persen	2,615,415,000	100 Persen	2,876,956,500	100 Persen	10,031,521,500		
			1	01	03	1	01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal berupa Muatan Pembelajaran yang dikembangkan, ditetapkan, diintegrasikan dan diimplementasikan pada Pendidikan Menengah SMA/SMK		100 Persen	1,446,500,000	100 Persen	1,591,150,000	100 Persen	1,750,265,000	100 Persen	1,925,291,500	100 Persen	6,713,206,500	Bidang Pembinaan SMA dan SMK	
			1	01	03	1	01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Pembinaan SMA dan SMK	
			1	01	03	1	01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Pembinaan SMA dan SMK	
			1	01	03	1	01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia		100 Persen	676,500,000	100 Persen	744,150,000	100 Persen	818,565,000	100 Persen	900,421,500	100 Persen	3,139,636,500	Bidang Pembinaan SMA dan SMK	
			1	01	03	1	01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya		100 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang Pembinaan SMA dan SMK	
			1	01	03	1	02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal berupa Muatan Pembelajaran yang dikembangkan, ditetapkan, diintegrasikan dan diimplementasikan pada Pendidikan Khusus		100 Persen	715,000,000	100 Persen	786,500,000	100 Persen	865,150,000	100 Persen	951,665,000	100 Persen	3,318,315,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD dan Dikdas	
			1	01	03	1	02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD dan Dikdas	
			1	01	03	1	02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun		100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD dan Dikdas	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET		
												2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)								
1	2	3	3						4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18
			1	01	03	1	02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia		100 Persen	192,500,000	100 Persen	211,750,000	100 Persen	232,925,000	100 Persen	256,217,500	100 Persen	893,392,500	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD dan Dikdas	
			1	01	03	1	02	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya		100 Persen	192,500,000	100 Persen	211,750,000	100 Persen	232,925,000	100 Persen	256,217,500	100 Persen	893,392,500	Bidang Bidang PK & Tugas Pembantuan PAUD dan Dikdas	
			1	01	04	1			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000		
			1	01	04	1	01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus yang terpenuhi		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang PTK	
			1	01	04	1	01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	798,600,000	100 Persen	878,460,000	100 Persen	3,063,060,000	Bidang PTK	
			1	01	04	1	01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		100 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang PTK	
			1	01	05	1			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan		100 Persen	500,000,000	100 Persen	550,000,000	100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	2,320,500,000		
			1	01	05	1			Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100 Persen	200,000,000	100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	928,200,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	05	1	01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 Persen	100,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	464,100,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	05	1	01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 Persen	100,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	464,100,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	05	2			Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100 Persen	300,000,000	100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	1,392,300,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	05	2	01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 Persen	100,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	464,100,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	05	2	01	1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 Persen	100,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	464,100,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	05	2	01	2	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100 Persen	100,000,000	100 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	464,100,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
Mewujudkan Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Barat	Meningkatnya Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdada dikembangkan dan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata dikembangkan dan di Lestarikan	1	01	06	1			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang didokumentasikan dan dikembangkan		100 Persen	1,980,000,000	100 Persen	2,178,000,000	100 Persen	2,395,800,000	100 Persen	2,635,380,000	100 Persen	9,189,180,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	06	1	01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibina, dikembangkan dan dilindungi		100 Persen	1,980,000,000	100 Persen	2,178,000,000	100 Persen	2,395,800,000	100 Persen	2,635,380,000	100 Persen	9,189,180,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	06	1	01	1	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	06	1	01	3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi		100 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	06	1	01	4	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1	01	06	1	01	5	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi		100 Persen	935,000,000	100 Persen	1,028,500,000	100 Persen	1,131,350,000	100 Persen	1,244,485,000	100 Persen	4,339,335,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	KET
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
							8	9	7	8	9	10	11	12	17	18		
1	2	3	3	4	5	6	8	9	7	8	9	10	11	12	17	18	17	18
			1 01 06 1 01 6	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		100 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			1 01 06 1 01 7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun		100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	292,820,000	100 Persen	1,021,020,000	Bidang Kebudayaan dan Sekretariat	
			2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan		100 Persen	4,950,000,000	100 Persen	5,445,000,000	100 Persen	5,989,500,000	100 Persen	6,588,450,000	100 Persen	22,972,950,000		
			2 22 02 1 01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pagelaran Budaya yang diselenggarakan		100 Persen	2,530,000,000	100 Persen	2,783,000,000	100 Persen	3,061,300,000	100 Persen	3,367,430,000	100 Persen	11,741,730,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 01 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		80 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	2,415,765,000	100 Persen	8,423,415,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 01 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		80 Persen	385,000,000	100 Persen	423,500,000	100 Persen	465,850,000	100 Persen	512,435,000	100 Persen	1,786,785,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 01 3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		80 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan dan UPTD Taman Budaya & Museum	
			2 22 02 1 02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			100 Persen	605,000,000	100 Persen	665,500,000	100 Persen	732,050,000	100 Persen	805,255,000	100 Persen	2,807,805,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 02 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		80 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 02 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		80 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		0	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	2,415,765,000	100 Persen	8,423,415,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 03 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		80 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 03 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		80 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 02 1 03 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		80 Persen	1,155,000,000	100 Persen	1,270,500,000	100 Persen	1,397,550,000	100 Persen	1,537,305,000	100 Persen	5,360,355,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000		
			2 22 03 1 01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dibina dan dikembangkan		100 Persen	1,100,000,000	100 Persen	1,210,000,000	100 Persen	1,331,000,000	100 Persen	1,464,100,000	100 Persen	5,105,100,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 03 1 01 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		70 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	798,600,000	100 Persen	878,460,000	100 Persen	3,063,060,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 03 1 01 2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi		70 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 03 1 01 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		70 Persen	110,000,000	100 Persen	121,000,000	100 Persen	133,100,000	100 Persen	146,410,000	100 Persen	510,510,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan		100 Persen	3,234,000,000	100 Persen	3,557,400,000	100 Persen	3,913,140,000	100 Persen	4,304,454,000	100 Persen	15,008,994,000		
			2 22 04 1 01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang difasilitasi dan didokumentasikan		100 Persen	3,234,000,000	100 Persen	3,557,400,000	100 Persen	3,913,140,000	100 Persen	4,304,454,000	100 Persen	15,008,994,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 04 1 01 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		60 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 04 1 01 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		60 Persen	1,650,000,000	100 Persen	1,815,000,000	100 Persen	1,996,500,000	100 Persen	2,196,150,000	100 Persen	7,657,650,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 04 1 01 3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat		60 Persen	924,000,000	100 Persen	1,016,400,000	100 Persen	1,118,040,000	100 Persen	1,229,844,000	100 Persen	4,288,284,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 04 1 01 4	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal		60 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan		100 Persen	6,358,000,000	100 Persen	6,993,800,000	100 Persen	7,693,180,000	100 Persen	8,462,498,000	100 Persen	29,507,478,000		
			2 22 05 1 01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Provinsi		100 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan	
			2 22 05 1 01 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		80 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Kebudayaan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah PenangggungJawa	KET
												Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			1	2	3	4	5	6				8	9	7	8	9	10	11	12	17	18		
			2	22	05	1	01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		80 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Kebudayaan	
			2	22	05	1	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Cagar Budaya yang dicegah dan ditanggulangi dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan		100 Persen	6,028,000,000	100 Persen	6,630,800,000	100 Persen	7,293,880,000	100 Persen	8,023,268,000	100 Persen	27,975,948,000	Bidang Kebudayaan	
			2	22	05	1	02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi		80 Persen	583,000,000	100 Persen	641,300,000	100 Persen	705,430,000	100 Persen	775,973,000	100 Persen	2,705,703,000	Bidang Kebudayaan	
			2	22	05	1	02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		80 Persen	4,950,000,000	100 Persen	5,445,000,000	100 Persen	5,989,500,000	100 Persen	6,588,450,000	100 Persen	22,972,950,000	Bidang Kebudayaan	
			2	22	05	1	02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		80 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	Bidang Kebudayaan	
			2	22	05	1	02	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		80 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	Bidang Kebudayaan	
			2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Cagar Budaya yng Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		100 Persen	1,485,000,000	100 Persen	1,633,500,000	100 Persen	1,796,850,000	100 Persen	1,976,535,000	100 Persen	6,891,885,000		
			2	22	06	1	01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum Provinsi yang dikelola dan dimanfaatkan		100 Persen	1,485,000,000	100 Persen	1,633,500,000	100 Persen	1,796,850,000	100 Persen	1,976,535,000	100 Persen	6,891,885,000	UPTD Taman Budaya & Museum	
			2	22	06	1	01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		70 Persen	330,000,000	100 Persen	363,000,000	100 Persen	399,300,000	100 Persen	439,230,000	100 Persen	1,531,530,000	UPTD Taman Budaya & Museum	
			2	22	06	1	02	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		70 Persen	165,000,000	100 Persen	181,500,000	100 Persen	199,650,000	100 Persen	219,615,000	100 Persen	765,765,000	UPTD Taman Budaya & Museum	
			2	22	06	1	03	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		70 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000	UPTD Taman Budaya & Museum	
			2	22	06	1	04	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		70 Persen	440,000,000	100 Persen	484,000,000	100 Persen	532,400,000	100 Persen	585,640,000	100 Persen	2,042,040,000	UPTD Taman Budaya & Museum	
			2	22	06	1	05	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		70 Persen	275,000,000	100 Persen	302,500,000	100 Persen	332,750,000	100 Persen	366,025,000	100 Persen	1,276,275,000	UPTD Taman Budaya & Museum	